

Peranan Bank Indonesia dalam mengawasi transaksi tunai atas penjualan atau pembelian uang kertas asing = The role of Bank Indonesia in monitoring cash transaction for the sale or purchase of foreign banknotes

Khairunnisa Riani Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485769&lokasi=lokal>

Abstrak

Transaksi valuta asing Devisa Umum (DU) dan penjualan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) memiliki celah terjadinya praktik kejahatan. Rumusan masalah pertama mengenai pengaturan transaksi valuta asing DU maupun UKA di Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tujuan khusus penelitian mengetahui pengaturan transaksi valuta asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif melalui wawancara dan dukungan data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan Transaksi Valuta Asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia diatur dalam PBI dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan meliputi PBI No. 18/18/PBI/2016 dan PBI 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, serta PBI lainnya.

Selanjutnya kepada PPATK terdapat Laporan Transaksi keuangan Tunai dan Mencurigakan, serta Transfer Dana Dari/Atau keluar Negeri. Peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia belum maksimal karena pelaporan UKA hanya berupa pelaporan Lalu Lintas Kegiatan Devisa. Sebaiknya pelaporan kepada PPATK melalui KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank mencantumkan poin UKA sehingga dapat memastikan jika terjadi money laundering yang turut terintegrasi dengan BI dan OJK. Kepada BI dan OJK sebaiknya poin UKA juga dimasukkan dalam tiap laporan sebagaimana DU.

.....General foreign exchange (DU) and foreign banknotes (UKA) have a gap to open chance for a criminal activities. First discussion issue is consist a regulation of DU and UKA in foreign exchange transaction in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank in Indonesia and second discussion issue consist of Bank Indonesias (BI) role in monitoring sales and purchase UKA of Dolar Amerika Serikat in Indonesia. Normative jurisdictional research formed to a prescriptive data collection through an interview, observation, and secondary data support.

The result of research shown regulation DU and UKA in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank are PBI 18/18/PBI/2016 of foreign transaction in Rupiah for local and international party, PBI KUPVA Non Bank, and other regulation. For PPATK such as report cash transaction and suspicious transaction, and other regulation. BIs role isnt completely maximum since UKA report from KUPVA Bank to BI is only a foreign activity traffic report. Furthermore, foreign activity traffic report not pointing a counterparty and the purpose in saling and purchasing transaction UKA.

A suggest to PPATK is diliver in order a suspicious cash financial report and in or out abroad fund transfer

should be attached a UKA point. And in order to ensure whether money laundering and another crime act found, BI and OJK should include UKA point in daily/monthly same as general foreign as well. PPATK report should be integrated with BI and OJK to crystalize a synchronity and cooperation to maintain Rupiah stability and to prevent crime.